

# KONDISI PUSTAKAWAN PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA<sup>1</sup>

Oleh:

Ir. Abdul Rahman Saleh, M.Sc.<sup>2</sup>

## PENDAHULUAN

Salah satu komponen yang menentukan keberhasilan layanan perpustakaan di perguruan tinggi adalah sumberdaya manusia (manpower). Sumberdaya manusia di perpustakaan menurut Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi terbitan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terdiri dari: Pustakawan, tenaga administrasi dan tenaga kejuruan. Pustakawan sendiri terdiri dari Pustakawan dengan pendidikan kesarjana dalam ilmu perpustakaan, atau yang sederajat, dengan tugas melaksanakan *tugas keprofesian* dalam bidang perpustakaan dan Pustakawan (Asisten Pustakawan menurut SK Menpan 33/1998) dengan pendidikan tingkat akademi atau diploma dengan tugas melaksanakan *tugas penunjang keprofesian* dalam bidang perpustakaan. Tenaga administrasi adalah tenaga dengan tugas melaksanakan kegiatan kepegawaian, kearsipan, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan, penjilidan, perlistrikan, grafika, komputer, tata ruang dan lain-lain. Sedangkan tenaga kejuruan adalah tenaga fungsional lain dengan pendidikan kejuruan atau tingkat kesarjana dengan tugas melaksanakan pekerjaan keahlian pada berbagai bidang seperti pranata komputer, kearsipan, dan pandang dengar.

Pembahasan tulisan kali ini penulis batasi pada kondisi tenaga fungsional pustakawan sesuai dengan SK Menpan nomor 33/1998 yang ada di perguruan tinggi. Data diperoleh dari pangkalan data Pusat Pengembangan Pustakawan, Perpustakaan Nasional RI. Pembahasan didasarkan pada data yang ada saja yaitu sebanyak 41 perguruan tinggi negeri (dari kurang lebih 75 perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia). Sampel sebesar ini penulis anggap dapat mewakili keadaan seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

## KEADAAN TENAGA PERPUSTAKAAN

### Umum

Jumlah pustakawan dan asisten pustakawan di Perguruan Tinggi yang tercatat di Pusat Pengembangan Pustakawan, Perpustakaan Nasional RI adalah sebanyak 889 orang (lihat tabel 1, terdiri dari 475 laki-laki (53,4 %) dan 414 perempuan (46,6 %). Dari tabel tersebut terlihat jumlah Asisten Pustakawan sebanyak 576 orang atau sebesar 64,8 % (terdiri dari Asisten Pustakawan Pratama 178 orang (20,02 %), Asisten Pustakawan Muda 305 orang (34,31 %), Asisten Pustakawan Madya sebanyak 93 orang (10,46 %); dan Pustakawan sebanyak 309 orang atau sebesar 34,8 % yang terdiri dari Pustakawan Pratama sebanyak 95 orang (10,69 %), Pustakawan Muda sebanyak 152 orang (17,10 %), Pustakawan

---

<sup>1</sup> Dimuat di Majalah Media Pustakawan vol. 9 No. 4 Desember 2002 hal. 9 – 12.

<sup>2</sup> Kepala Perpustakaan Institut Pertanian Bogor, dan Ketua Umum Pengurus Pusat Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia.

Madya sebanyak 61 orang (6,86 %), dan Pustakawan Utama sebanyak 1 orang (0,11 %); sedangkan yang tidak mengisi kolom jabatan adalah 4 orang (0,45 %)

Tabel 1. Keadaan Pejabat Fungsional Pustakawan di Beberapa Perguruan Tinggi pada tahun 2002.

Perpustakaan	Jumlah Staf Perpustakaan								Kosong	Jumlah
	Asisten Pustakawan			Pustakawan						
	Prat	Muda	Madya	Prat	Muda	Madya	Utama			
Akademi Keperawatan Trenggalek		1								1
AKPER Lumajang		1								1
IAIN SUSQA Pekanbaru			1	3	2	2				8
IKIP Manado	5	5	1	2	6	2				21
IKIP Negeri Gorontalo	3			1				4		8
IKIP Negeri Singaraja	1	8	1		1	2				13
Institut Pertanian Bogor	10	22	4	3	7	2				48
Institut Seni Indonesia Yogyakarta	5	3	1	1						10
Institut Teknologi Bandung (ITB)	2	5		1	4	4				16
Institut Teknologi Sepuluh Nopember		11	1	1	3	2				18
Politeknik Negeri Bandung				1						1
STSI Surakarta	4	5	1	1	1					12
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	7	3	5	8	5	4	1			33
Universitas Airlangga	4	15	5		5	2				31
Universitas Andalas	5	8	3	5	3	2				26
Universitas Brawijaya	6	13		5	1	1				26
Universitas Cendrawasih	5	2			2					9
Universitas Gadjah Mada	22	30	7	1	5	2				67
Universitas Haluoleo	4	1		5	4	2				16
Universitas Hasannudin	2	7	9	11	12	2				43
Universitas Indonesia	3	10	6	2						21
Universitas Lambung Mangkurat	5	7	3		8					23
Universitas Lampung	5	9		2	2	1				19
Universitas Mataram	5	6	1	2	4	1				19
Universitas Negeri Jakarta	4	11	4	2	2	2				25
Universitas Negeri Makasar	5	7	1	5	2					20
Universitas Negeri Malang	3	7		5	9	1				25
Universitas Negeri Medan	4	9	3	1	4	3				24
Universitas Negeri Semarang	3	5	4	3	6	2				23
Universitas Negeri Surabaya	1	7	2	4	5					19
Universitas Negeri Yogyakarta	3	7			3					13
Universitas Nusa Cendana	2	1		2						5
Universitas Padjadjaran	2	9	3	1	6	1				22
Universitas Palangkaraya	2	4			5					11
Universitas Pendidikan Indonesia	5	9	2	6	5					27
Universitas Riau	5	1		1						7
Universitas Sam Ratalangi Manado	17	10	8	1	3	3				42
Universitas Sebelas Maret	8	11	4	4	3	3				33
Universitas Sriwijaya	3	7	7	1	8	3				29
Universitas Syiah Kuala	6	10	6	1	10	8				41
Universitas Udayana	2	18		3	6	4				33
<b>Jumlah</b>	<b>178</b>	<b>305</b>	<b>93</b>	<b>95</b>	<b>152</b>	<b>61</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>889</b>	

### **Komposisi Pejabat Pustakawan**

Perpustakaan yang paling banyak memiliki pustakawan dan asisten adalah Universitas Gadjah Mada yaitu sebanyak 67 orang. Namun sebagian besar dari pegawai perpustakaan UGM menduduki jabatan asisten pustakawan (sebanyak 59 orang), sedangkan sisanya (8 orang) menduduki jabatan pustakawan. Sedangkan yang memiliki jumlah pegawai yang menduduki pustakawan terbanyak adalah Universitas Hasanuddin yaitu sebesar 25 orang. Padahal jumlah pejabat asisten pustakawannya hanya sebanyak 18 orang. Perbandingan yang ideal menurut Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah 1 untuk pustakawan profesional, 3 untuk para-profesional (asisten) dan 5 untuk tenaga teknis dan administrasi. Jika komposisi Pustakawan dibanding Asisten yang ideal adalah 1:3, maka beberapa perpustakaan sudah memenuhi atau mendekati kondisi ideal tersebut. Perpustakaan-perpustakaan tersebut antara lain adalah IKIP Gorontalo (1 : 3); IKIP Singaraja (3 : 10); Institut Pertanian Bogor (12 : 36); Universitas Negeri Jakarta (6 : 19); Universitas Negeri Yogyakarta (3 : 10). Beberapa perpustakaan yang memiliki perbandingan yang sangat ekstrim dimana perpustakaan tersebut tidak memiliki pustakawan dan hanya memiliki tenaga asisten seperti: Akademi Keperawatan Trenggalek dan Akper Lumajang. Bahkan ada perpustakaan yang hanya memiliki pejabat pustakawan dan tidak memiliki asisten pustakawan seperti: Politeknik Negeri Bandung. Sayangnya hampir tidak ada perpustakaan perguruan tinggi yang memiliki pustakawan dengan jenjang yang tertinggi yaitu pustakawan utama. Bahkan perpustakaan dari perguruan tinggi yang terkemuka satupun belum memiliki pustakawan utama. Satu-satunya pustakawan utama hanya berasal dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Padahal banyak sekali pustakawan perguruan tinggi yang memiliki potensi dan kemampuan untuk mencapai jabatan puncak pustakawan tersebut. Dugaan penulis adalah hal ini terjadi karena kurangnya insentif (baca= penghargaan) yang diberikan oleh jabatan pustakawan. Karena itu motivasi untuk meraih jabatan tertinggi bagi pustakawan ini bagi sebagian orang tidaklah terlalu besar. Sementara tantangan lain di luar dan yang tidak berkaitan dengan jabatan pustakawan sangatlah besar.

### **Komposisi Umur Pustakawan**

Dari segi usia pustakawan, yang paling muda adalah 24 tahun dan yang paling tua adalah 64 tahun. Seharusnya usia tertua adalah 60 tahun karena batas usia pensiun adalah 60 tahun. Sedangkan pustakawan yang berusia 44 tahun merupakan jumlah yang terbanyak (6,19 %). Namun yang menarik adalah komposisi usia pustakawan tersebut tidak merata. Sebagian besar (20,81 %) berada pada usia 45 – 48 tahun, diikuti usia 41 – 44 tahun (18,56 %) dan 49 – 52 tahun (16,65 %). Sedangkan usia muda atau 24 – 28 tahun sangat sedikit (0,9 %). Ini sebagai dampak dari kebijakan pemerintah mengenai formasi pegawai dimana sejak pertengahan tahun 1990an hampir tidak ada pengangkatan baru pegawai negeri sipil (zero growth). Bila kondisi ini berlangsung terus, pada suatu ketika akan berbahaya bagi kelangsungan layanan perpustakaan, karena pada saatnya nanti perpustakaan akan kekurangan pegawai. Terutama jika kelompok umur 41 – 52 tahun (dimana kelompok usia ini merupakan jumlah terbanyak yaitu sebanyak 56,02 %) memasuki masa pensiun. Pada saat itu perpustakaan harus melakukan rekrutmen besar-besaran untuk mengisi kekosongan akibat pustakawan pensiun. Jika ini terjadi maka komposisi pejabat

pustakawan akan mengalami ketimpangan karena yang akan terjadi adalah penumpukan jumlah pejabat pada asisten pustakawan pratama dan pustakawan pratama. Sedangkan jabatan di atasnya akan kurang. Seharusnya formasi pegawai untuk pustakawan dan asisten setiap tahun harus tersedia sekurang-kurangnya rata-rata 2,5 % dari total pustakawan. Hal ini karena rata-rata pustakawan yang pensiun setiap tahun adalah 2,5 %. Atau jika rekrutmen ini akan didasarkan kepada pengelompokan pangkat dan jabatan pustakawan yaitu diasumsikan kenaikan pangkat dan jabatan tersebut adalah rata-rata 4 tahun, maka setiap empat tahun pemerintah harus menyediakan formasi sekurang-kurangnya sebanyak 10 %. Ini akan menjamin kelancaran pekerjaan di perpustakaan, karena setiap jenjang akan terisi dengan komposisi jumlah pustakawan yang ideal.

Tabel 2. Sebaran Umur Tenaga Perpustakaan di 41 Perpustakaan Perguruan Tinggi di Indonesia tahun 2002.

No	Usia	Jumlah	%	No	Usia	Jumlah	%
1.	24	1	0.11	21	45	49	5.51
2.	26	4	0.45	22	46	40	4.50
3.	27	2	0.22	23	47	51	5.74
4.	28	1	0.11	24	48	45	5.06
5.	29	3	0.34	25	49	47	5.29
6.	30	3	0.34	26	50	47	5.29
7.	31	8	0.90	27	51	25	2.81
8.	32	7	0.79	28	52	29	3.26
9.	33	12	1.35	29	53	22	2.47
10.	34	12	1.35	30	54	20	2.25
11.	35	15	1.69	31	55	19	2.14
12.	36	17	1.91	32	56	15	1.69
13.	37	32	3.60	33	57	16	1.80
14.	38	30	3.37	34	58	22	2.47
15.	39	36	4.05	35	59	11	1.24
16.	40	36	4.05	36	60	20	2.25
17.	41	29	3.26	37	61	6	0.67
18.	42	36	4.05	38	62	2	0.22
19.	43	45	5.06	39	64	2	0.22
20.	44	55	6.19	40	kosong	17	1.91
				<b>Jumlah</b>		<b>889</b>	<b>100.00</b>

Tabel 3. Sebaran Pustakawan menurut kelompok umur tahun 2002.

Usia	jumlah	%
24-28	8	0.90
29-32	21	2.36
33-36	56	6.30
37-40	134	15.07
41-44	165	18.56
45-48	185	20.81
49-52	148	16.65
53-56	76	8.55
57-60	69	7.76
>60	10	1.12
kosong	17	1.91
<b>Jumlah</b>	<b>889</b>	<b>100.00</b>

### **Pendidikan Pustakawan**

Dari aspek pendidikan maka sebagian besar pejabat pustakawan adalah berpendidikan Diploma dan Sarjana Muda (43,08 %), diikuti oleh yang berpendidikan S1 31,83 %. Sedangkan yang berpendidikan S2 hanya sebesar 4,39 %. Yang menarik adalah masih adanya pejabat fungsional yang berpendidikan SLTA dengan jumlah yang cukup besar (20,70 %). Padahal persyaratan untuk menduduki jabatan fungsional pustakawan adalah sekurang-kurangnya harus berpendidikan Diploma. Banyaknya pejabat fungsional yang berpendidikan SLTA ini disebabkan karena penyesuaian dari pegawai administrasi menjadi pejabat fungsional pustakawan pada tahap awal diberlakukannya SK Menpan mengenai jabatan pustakawan (in passing). Pejabat fungsional yang berpendidikan SLTA ini ternyata sebagian besar dapat mengembangkan karirnya di pustakawan. Ini dibuktikan dari hanya 33 orang dari 184 yang menduduki jabatan terakhir lebih dari 4 tahun (TMT jabatan 1997 atau sebelumnya). Selebihnya menduduki jabatan terakhir selama empat tahun atau kurang.

Tabel 4. Pendidikan Pustakawan dan Asisten keadaan tahun 2002

Pendidikan	Jumlah	%
SLTA	184	20.70
Diploma dan SM	383	43.08
S1	283	31.83
S2	39	4.39
	889	100.00

Tabel 5. Pendidikan Pustakawan Keadaan tahun 2002.

Pendidikan	Jumlah	%
SLTA	4	1.29
Diploma dan SM	5	1.62
S1	261	84.47
S2	39	12.62
	309	100.00

Pejabat Pustakawan masih ada yang berpendidikan SLTA dan Diploma atau Sarjana Muda. Padahal menurut SK Menpan 33 jabatan pustakawan hanya diisi oleh yang berpendidikan S1 ke atas. Sedangkan diploma ke bawah mestinya hanya menduduki jabatan asisten (walaupun dimungkinkan jabatan asisten diteruskan ke jabatan pustakawan, namun hal ini belum diatur dalam petunjuk teknis bagaimana mekanisme dan persyaratannya).

### **Lamanya Menduduki Jabatan**

Dari data TMT jabatan terakhir diketahui bahwa pejabat fungsional yang menduduki jabatan terakhir sama dengan 4 tahun atau lebih adalah sebesar 33, 86 %, sedangkan yang menduduki jabatan kurang dari 4 tahun adalah sebesar 62,32 %. Sebagian pustakawan tidak mencantumkan TMT jabatan terakhirnya (3,82 %). Ini berarti sebagian besar pustakawan dapat naik jabatan kurang dari empat tahun. Keluhan bahwa pustakawan

kesulitan mendapatkan angka kredit sebenarnya kurang beralasan karena terbukti sebagian besar pustakawan menduduki jabatan terakhirnya kurang dari 4 tahun, artinya pustakawan tersebut dapat naik jabatan paling lama 4 tahun sekali, bahkan sebagian pustakawan bisa naik jabatan lebih cepat dari 4 tahun. Pustakawan yang paling lama menduduki jabatan terakhirnya adalah pustakawan dan UIN Syarif Hidayatullah (TMT 1985).

Tabel 6. Lamanya Pustakawan menduduki jabatan terakhir (berdasarkan tahun TMT)

Lamanya	jumlah	%
>= 4 tahun	301	33.86
< 4 tahun	554	62.32
Tdk ada data	34	3.82
<b>Jumlah</b>	<b>889</b>	<b>100.00</b>

Seharusnya keadaan ini tidak terjadi, karena menurut SK Menpan nomor 18 tahun 1988, pejabat fungsional yang tidak naik jabatan lebih dari 6 tahun harus diberhentikan dari jabatan pustakawan. Baru pada SK Menpan nomor 33 tahun 1998, peraturan ini direvisi. Sayangnya dari data tersebut tidak dapat diketahui pustakawan yang dapat naik jabatan tercepat.

## PENUTUP

Dari perhitungan data yang berasal dari pangkalan data yang ada di Pusat Pengembangan Pustakawan, Perpustakaan RI dapat dikemukakan beberapa hal yang perlu perhatian serius semua pihak, khususnya Perpustakaan Nasional RI, sebagai pembina pustakawan yaitu:

1. Perlunya diperjuangkan agar formasi tenaga perpustakaan segera dibuka. Hal ini untuk menghindari kekurangan tenaga perpustakaan (baca : pustakawan) di masa depan.
2. Perlunya segera memperbaiki komposisi pustakawan dan asisten sehingga mendekati 1:3 yang direkomendasikan oleh Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi terbitan Dirjen Dikti.
3. Perlunya bimbingan terhadap pustakawan agar pengembangan karir mereka tidak terhambat. Hal ini mengingat masih banyaknya pustakawan yang menduduki satu jenjang jabatan lebih dari 4 tahun.
4. Perlunya sistem insentif yang baik dan lebih menantang untuk mendorong pustakawan perguruan tinggi mencapai puncak karir (pustakawan utama). Sistem insentif ini tidak harus berbentuk imbalan uang, namun bisa saja dalam bentuk penghargaan yang lain.

Hal-hal yang menjadi catatan ini perlu menjadi wacana agar mendapatkan perhatian dari para pustakawan perguruan tinggi pada umumnya, dan menjadi bahan masukan bagi Pusat Pengembangan Pustakawan, Perpustakaan Nasional RI agar program pengembangan pustakawan dimasa datang dapat diarahkan untuk memperbaiki keadaan pustakawan, khususnya di perguruan tinggi.

Bogor, 9 Januari 2003